

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pemutusan hubungan kerja dan peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan PHK memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan Tetap di Perusahaan

Meskipun perusahaan telah menerapkan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan regulasi yang berlaku, masih terdapat permasalahan mendasar terkait status hubungan kerja yang menimbulkan ketidaksepakatan antara pekerja dan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PHK tidak hanya bergantung pada pemenuhan prosedural, tetapi juga pada kejelasan dan kesepakatan mengenai status kerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa status hubungan kerja yang diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum guna menghindari potensi konflik ketenagakerjaan. Dalam konteks PT Pertiwi Indo Mas, persoalan utama yang menjadi sumber konflik adalah status hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan, yakni apakah hubungan tersebut bersifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kasus PHK terhadap

karyawan tetap di PT Pertiwi Indo Mas menjadi gambaran nyata betapa pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dan kejelasan status kerja dalam hubungan industrial. PHK seharusnya tidak hanya menjadi sarana efisiensi atau alat untuk menyederhanakan struktur perusahaan, tetapi harus dilakukan secara transparan, bermartabat, dan berdasarkan prinsip keadilan hukum.

2. Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan PHK berdasarkan Putusan MA Nomor 1038K/Pdt.Sus-PHI/2024 jo Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), peran serikat pekerja terbukti signifikan dalam mendukung gugatan pekerja yang mengalami PHK. Serikat pekerja memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan memperkuat posisi pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Dengan adanya peran aktif serikat pekerja, pekerja memiliki perlindungan yang lebih baik dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan. Putusan pengadilan dalam kasus ini menjadi penentu bagi pekerja dalam memperoleh kompensasi dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, serikat pekerja menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak pekerja yang mengalami PHK. Peran ini diwujudkan melalui pendampingan hukum, advokasi, serta keterlibatan dalam proses negosiasi bipartit hingga litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial. Serikat pekerja juga membantu pekerja memahami

proses hukum, mengumpulkan bukti, serta menjadi representasi formal dalam persidangan, sebagaimana diperkuat dalam UU No. 2 Tahun 2004 dan Pasal 87 di dalamnya. Kasus yang melibatkan PT Pertiwi Indo Mas dan pekerjanya adalah contoh konkret dari efektivitas peran ini. Secara normatif, peran serikat pekerja dalam konteks penyelesaian PHK mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Untuk itu, perlu terus didorong penguatan kapasitas serikat pekerja di bidang hukum dan advokasi, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pekerja dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memperjelas status hubungan kerja karyawan sejak awal. Selain itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara manajemen dan pekerja guna menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu perselisihan ketenagakerjaan.

2. Bagi Serikat Pekerja

Serikat pekerja harus terus meningkatkan kapasitasnya dalam memahami peraturan ketenagakerjaan, memperkuat strategi advokasi, serta memperluas kerja sama dengan lembaga hukum dan pemerintah. Dengan

demikian, serikat pekerja dapat lebih efektif dalam mendampingi dan membela hak-hak pekerja yang mengalami PHK.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan PHK oleh perusahaan guna memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan yang menjamin perlindungan bagi pekerja, terutama dalam hal kepastian hukum terkait status hubungan kerja.